



Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah Dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Tongam Sinambela¹

Suci Rahmawati²

Fakultas Ekonomi Universitas Mpu Tantular
tongamsinambela@mputantular.ac.id¹, sucirahmawati760@gmail.com²

Abstrak

Riset ini bermaksud untuk meneliti pengaruh inflasi, nilai tukar rupiah dan jumlah pengusaha kena pajak terhadap penerimaan pajak pertambahan nilai. Penelitian ini dilakukan di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak Jakarta. Populasi dalam penelitian ini adalah data inflasi, nilai tukar Rupiah, jumlah pengusaha kena pajak dan jumlah penerimaan pajak pertambahan nilai. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder. Sedangkan alat analisis yang digunakan adalah menggunakan Statistical Package the Social Science (SPSS). Hasil riset menyatakan bahwa inflasi, nilai tukar rupiah dan jumlah PKP secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN. Pengujian secara simultan inflasi, nilai tukar rupiah dan jumlah PKP berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN.

Kata kunci : Inflasi, Nilai Tukar Rupiah, Jumlah Pengusaha Kena Pajak, dan PPN

Abstract

Research on taxes, the rupiah exchange rate and the number of entrepreneurs. This research was conducted at the Jakarta Directorate General of Tax Head Office. The population in this study is data on inflation, the amount of rupiah exchange, the number of tax entrepreneurs and the amount of value added tax. The data source used is secondary data. While the analytical tool used was Statistical Package the Social Science (SPSS). The results showed that inflation, the rupiah exchange rate and the number of PKP partially did not significantly influence the receipt of VAT. Gradually, the rupiah exchange rate and the number of PKP have a significant effect on VAT receipts.

Keywords: Inflation, Rupiah Exchange Rate, PKP, and VAT

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai salah satu negara berkembang sedang berusaha semaksimal mungkin melaksanakan pembangunan nasional. Salah satu hambatan terbesar dalam pembangunan saat ini adalah masalah pendanaan. Salah satu sumber pendanaan negara yang terbesar yaitu dari sektor pajak. Selain untuk mendanai pembangunan, pajak juga berperan sebagai jembatan penunjang perbaikan perekonomian masyarakat.

Secara sederhana, pajak memiliki peranan penting dalam penyelenggaraan kepentingan bersama demi mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan melakukan pemerataan disegala bidang dan pembangunan di Indonesia (Sinambela, Tongam 2016).

Sumber penerimaan negara dari pajak meliputi pajak dalam negeri dan pajak dari perdagangan internasional. Pajak dalam negeri meliputi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P3). Penerimaan pajak dalam APBN adalah sumber penerimaan terbesar negara dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sumber penerimaan pajak terbesar kedua setelah Pajak Penghasilan (PPh). Menurut UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN dan PPnBM, PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di dalam Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat disetiap jalur produksi dan distribusi.

Kegiatan konsumsi bagi negara berkembang seperti Indonesia merupakan salah satu kegiatan ekonomi utama yang dilakukan, maka dari itu semakin bertambah kegiatan konsumsi masyarakat berarti akan berpengaruh kepada jumlah penerimaan PPN (Wijayanti, 2015:23). Berdasarkan hal

tersebut sehingga dapat dikatakan bahwa PPN memiliki hubungan erat dengan kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi merupakan kegiatan vital demi kelangsungan negara karenanya diperlukan faktor internal dan eksternal untuk menjaga kestabilan kegiatan perekonomian agar sumber penerimaan yang dalam hal ini berkaitan dengan kegiatan konsumsi yaitu PPN tetap selalu terjaga penerimaannya (Renata, dkk, 2016:2).

Stabilitas dan faktor ekonomi makro seperti inflasi secara positif dapat mempengaruhi penerimaan pajak (Wahyudi, 2009:211). Tinggi rendahnya inflasi dapat mempengaruhi transaksi ekonomi yang merupakan objek PPN.

Secara historis, tingkat dan volatilitas inflasi Indonesia lebih tinggi jika dibanding dengan negara-negara berkembang lain. Sementara negara berkembang lain mengalami tingkat inflasi di antara 3 - 5 persen per tahun pada periode 2005 - 2014, Inflasi tahunan di Indonesia memiliki rata-rata sekitar 8,5 persen dalam periode yang sama. Sejak mulai dari tahun 2015 inflasi di Indonesia boleh dikatakan terkendali. Masalah inflasi selalu diperhatikan oleh masyarakat dan pemerintah karena sifatnya yang fluktuasi dan pada Maret 2018 mencapai 3,40% yang disebabkan karena kenaikan harga bahan bakar minyak dan kebutuhan rumah tangga (Badan Pusat Statistik, 2018).

Variabel ekonomi makro yang lain yaitu nilai tukar. Nilai tukar adalah suatu perbandingan antara nilai mata uang suatu negara dengan Negara lain (Handiani, 2014:88). Pada saat nilai tukar mengalami penurunan maka harga barang domestic akan mengalami peningkatan, selanjutnya berpengaruh terhadap konsumsi masyarakat. Beberapa efek negatif jika hal ini terus berlangsung, diantaranya pada perusahaan dalam negeri yang dalam kegiatan usahanya melibatkan ekspor impor yang akan berlanjut pada

harga jual akhir yang ditawarkan kepada konsumen akan semakin tinggi menyebabkan daya beli konsumen menurun, yang tentu saja akan menyebabkan penurunan penerimaan PPN.

Perumusan Masalah

1. Apakah inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPN?
2. Apakah nilai tukar rupiah berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPN?
3. Apakah jumlah PKP berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPN?
4. Apakah inflasi, nilai tukar rupiah dan jumlah PKP berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap penerimaan PPN?

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengaruh Inflasi Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Tingkat inflasi merupakan persentasi kenaikan harga-harga pada suatu tahun tertentu berbanding dengan tahun sebelumnya. Untuk mengatasi inflasi, Bank Sentral akan mengurangi penawaran uang dan menaikkan suku bunga, sedangkan langkah yang akan dilakukan oleh Kementerian Keuangan adalah dengan mengurangi pengeluaran dan menaikkan pajak individu dan perusahaan (Sukirno, 2013).

Menurut Nuraeni (2011) dalam penelitian Warnita, Fauziati, dan Yulistia (2016) yang berjudul Pengaruh Tingkat Inflasi, Tingkat Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia, dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Penerimaan PPN, tingkat inflasi akan mempengaruhi harga BKP dan/atau JKP, di mana dasar pengenaan PPN merupakan harga perolehan dari BKP dan/atau JKP. Tarif yang dikenakan terhadap PPN adalah yaitu sebesar 10% dari harga perolehan. Hal tersebut membuat inflasi mempengaruhi penerimaan PPN.

H₁ : Tingkat inflasi berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

2. Pengaruh Nilai Tukar Rupiah Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Nilai tukar (exchange rate) atau disebut juga kurs valuta asing menunjukkan harga atau nilai mata uang suatu negara dinyatakan dalam nilai mata uang negara lain. Nuraeni (2011) menjelaskan bahwa nilai tukar rupiah yang melemah terhadap mata uang asing atau terjadi depresiasi akan mengakibatkan kenaikan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. Hal tersebut akan mempengaruhi daya beli masyarakat dikarenakan harga barang dan jasa mengalami kenaikan sementara tingkat pendapatan masyarakat cenderung konstan atau tetap. Daya beli atau konsumsi masyarakat yang dipengaruhi oleh nilai tukar rupiah pada akhirnya akan mempengaruhi penerimaan PPN karena PPN merupakan pajak atas konsumsi. Maka hipotesis ke dua dalam penelitian ini adalah:

H₂ : Nilai tukar rupiah berpengaruh terhadap penerimaan PPN.

3. Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Dalam rangka mencapai target penerimaan pajak yang setiap tahun meningkat dalam APBN Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berupaya melakukan intensifikasi pajak dan ekstensifikasi pajak. Intensifikasi adalah untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak, misalnya melalui pemeriksaan pajak. Sedangkan ekstensifikasi dapat ditempuh dengan memperluas basis pengenaan pajak, seperti kenaikan jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang sudah terdaftar. Pelaksanaan program ekstensifikasi diharapkan dapat menambah subjek pajak baru, yakni PKP terdaftar. Tingkat kepatuhan dari PKP yang sudah terdaftar maupun yang baru terdaftar melalui program

ekstensifikasi diharapkan meningkat, sehingga mampu meningkatkan penerimaan perpajakan.

Penelitian yang dilakukan oleh Saepudin (2008) dan Aditya (2009) di dalam penelitian Nuraeni (2011), menunjukkan bahwa jumlah PKP berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN. Berdasarkan uraian tersebut, maka diharapkan jumlah PKP mempengaruhi penerimaan PPN, sehingga hipotesis berikutnya sebagai berikut:

H₃ : Jumlah PKP berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PPN.

4. Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Secara Simultan Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai

Upaya Guna meningkatkan penerimaan pajak khususnya PPN sebagai sumber penerimaan pajak terbesar kedua setelah Pajak Penghasilan (PPh) dalam APBN dapat dilakukan melalui faktor internal maupun eksternal. Upaya internal yang diambil oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk mencapai target penerimaan pajak yang setiap tahun meningkat dalam APBN adalah melakukan intensifikasi pajak dan ekstensifikasi pajak. Intensifikasi yaitu untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak melalui pemeriksaan pajak, sedangkan ekstensifikasi pajak dilakukan dengan memperluas basis pengenaan pajak, misalnya melalui kenaikan jumlah PKP terdaftar (Manurung et, al., 2001).

Upaya eksternal yang dilakukan pemerintah adalah dengan tetap menjaga stabilitas makro diantaranya stabilitas inflasi dan nilai tukar rupiah. Inflasi dan nilai tukar rupiah yang berfluktuatif akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, dimana pertumbuhan ekonomi akan ditransmisikan ke dalam penerimaan perpajakan Indonesia.

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai inflasi, nilai tukar rupiah dan jumlah PKP yang masing-masing diharapkan mempengaruhi penerimaan PPN, sehingga dapat diekspektasikan inflasi, nilai tukar rupiah dan jumlah PKP secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan PPN, untuk itu penulis membuat hipotesis sebagai berikut:

H₄ : Inflasi, nilai tukar rupiah dan jumlah PKP berpengaruh secara simultan dan signifikan terhadap penerimaan PPN.

5. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan analisis statistik melalui analisis regresi berganda. Analisis data dilakukan dengan bantuan aplikasi komputer, yaitu program SPSS . Namun sebelum di uji regresi berganda terlebih dahulu menguji asumsi klasik. Sampel yang digunakan merupakan teknik penentuan sampel jenuh yaitu menggunakan seluruh anggota populasi untuk digunakan sebagai sampel. Data penelitian ini berupa time series dalam kurun waktu dari tahun 2013 sampai tahun 2017 dengan data bulanan dengan jumlah sampelnya 60 pengamatan. Data yang dipergunakan berupa data sekunder baik kualitatif maupun kuantitatif. Data kuantitatif berupa data angka-angka yang terdapat pada data inflasi yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) melalui situs www.bps.go.id, data nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan diperoleh melalui situs www.bi.go.id dan dengan mendatangi Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak untuk memperoleh data jumlah PKP terdaftar yang terdiri dari WP PKP Badan dan Orang Pribadi serta realisasi penerimaan PPN. Periode data yang digunakan adalah dari Januari 2013 sampai dengan Desember 2017.

6. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Uji Asumsi Klasik

Berdasarkan hasil uji normalitas probability plot, menunjukkan data penelitian bersifat normal karena dapat dilihat dalam grafik titik bergerak mengikuti garis diagonal. Sedangkan hasil Uji multikolinieritas menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki nilai VIF < 10 dan TOL $\geq 0,1$ yang berarti seluruh variabel independen dalam penelitian ini bebas dari gejala multikolinieritas. Demikian halnya dengan hasil uji heterokedastisitas menunjukkan bahwa titik-titik data menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y, hal ini disimpulkan tidak terjadi Heteroskedastisitas pada model regresi. Untuk Hasil uji autokorelasi menunjukkan nilai Durbin-Watson sebesar 1,892. Karena nilai DW berkisar diantara -2 sampai +2, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi.

2. Hasil Uji Hipotesis

Tabel 3. Hasil Uji Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.370 ^a	.137	.091	25,710,180,317,8 62.400

a. Predictors: (Constant), PKP, INFLASI, KURS

b. Dependent Variable: PPN

Sumber : data sekunder yang diolah

Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai R Square sebesar 0,370. Hal ini berarti bahwa pengaruh variabel Inflasi, Nilai Tukar Rupiah dan Jumlah PKP terhadap Penerimaan PPN adalah sebesar 37% sedangkan sisanya sebesar 63% dijelaskan oleh variabel lain di luar penelitian ini.

3. Hasil Uji F

Tabel 4. Hasil Uji F

ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	5.872E+27	3	1.957E+27	2.961	.040 ^b
1 Residual	3.702E+28	56	6.610E+26		
Total	4.289E+28	59			

a. Dependent Variable: PPN

b. Predictors: (Constant), PKP, INFLASI, KURS

Sumber : data sekunder yang diolah

Uji signifikan secara simultan menghasilkan nilai F hitung > F tabel (2,961 > 2,37) dengan tingkat signifikan 0,040. Karena tingkat signifikan lebih kecil dari 0,05 (α) maka dapat disimpulkan bahwa Inflasi, Nilai Tukar Rupiah dan Jumlah PKP secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan PPN.

4. Hasil Uji t

Tabel 5. Hasil Uji t

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error				Beta
1	(Constant)	28082746646571.688	42567468061101.430		.660	.512
	INFLASI	-27482180871722.380	27482180871722.5160	-.038	-.200	.842
	KURS	1482061231.200	5626836226.522	.070	.263	.793
	PKP	97587170.770	114488877.389	.282	.852	.398

a. Dependent Variable: PPN

5. Pembahasan

a) Pengaruh Inflasi terhadap Penerimaan PPN

Berdasarkan tabel 5 pada variabel Inflasi menunjukkan bahwa nilai signifikan adalah sebesar $0,842 > 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa Inflasi tidak berpengaruh terhadap Penerimaan PPN, berarti H_1 ditolak dalam penelitian ini. Hal ini membuktikan bahwa konsumsi dan daya beli masyarakat akan berkurang karena Inflasi yang meningkat dan dampaknya pendapatan riil masyarakat akan menurun karena pada umumnya kenaikan pendapatan tidak akan secepat kenaikan harga-harga. Terjadinya Inflasi kemungkinan akan menurunkan jumlah barang yang akan dibeli karena harga barang yang meningkat, maka penerimaan PPN tidak terjadi kenaikan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Utari (2003), Warnita, dkk (2016) dan Puspitha (2018) yang membuktikan bahwa Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN.

b) Pengaruh Nilai Tukar Rupiah terhadap Penerimaan PPN

Berdasarkan tabel 5. dapat dilihat variabel Nilai Tukar Rupiah menunjukkan bahwa nilai signifikan adalah sebesar $0,793 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa Nilai Tukar Rupiah tidak berpengaruh terhadap Penerimaan PPN, sehingga H_2 ditolak dalam penelitian ini. Hal ini membuktikan bahwa Nilai Tukar Rupiah yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan mampu menciptakan penguatan terhadap Dollar Amerika Serikat. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Utari (2003), Prasojo (2015) dan Warnita, dkk (2016) yang menyatakan bahwa Nilai Tukar Rupiah secara parsial tidak berpengaruh terhadap Penerimaan PPN.

c. Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak terhadap Penerimaan PPN

Berdasarkan tabel 5. dapat dilihat variabel jumlah PKP menunjukkan bahwa nilai signifikan adalah sebesar $0,398 > 0.05$ maka dapat disimpulkan bahwa jumlah PKP tidak berpengaruh terhadap Penerimaan PPN, sehingga H_3 ditolak dalam penelitian ini. Hal ini membuktikan bahwa jumlah pengusaha kena pajak tidak berpengaruh secara signifikan karena dipengaruhi oleh pemakaian jasa konsultan perpajakan sehingga pajak yang dibayarkan dibuat seminimal mungkin. Lalu disebabkan juga oleh pengusaha kena pajak yang membandel ataupun menunggak dalam membayar pajak, atau pengusaha yang penghasilannya sudah seharusnya dikenakan pajak tidak mendaftarkan diri sebagai pengusaha kena pajak karena kurangnya pemahaman tentang sistem perpajakan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arif Nurrokhman (2013) dan Khairani Lubis (2016) yang menyatakan bahwa jumlah PKP tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN.

7. PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas diambil kesimpulan:

Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN dalam negeri pada kurun waktu Januari 2013 sampai dengan Desember 2017. Artinya jika terjadi inflasi mengakibatkan kuantitas barang yang dihasilkan menurun tetapi harga barang meningkat, maka penerimaan PPN akan tetap sama tidak terjadi kenaikan.

Nilai Tukar Rupiah tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN dalam negeri pada kurun waktu Januari 2013 sampai dengan Desember 2017. Nilai Tukar Rupiah yang telah ditetapkan oleh

Menteri Keuangan mampu menciptakan penguatan terhadap Dollar Amerika Serikat.

Jumlah Pengusaha Kena Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PPN dalam negeri pada kurun waktu Januari 2013 sampai dengan Desember 2017. Artinya jumlah Pengusaha Kena Pajak yang tercatat tidak memberikan pengaruh terhadap penerimaan PPN disebabkan banyaknya Pengusaha yang membandel dan menggunakan jasa konsultan pajak.

Inflasi, Nilai Tukar Rupiah dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak secara simultan berpengaruh terhadap penerimaan PPN dalam negeri pada kurun waktu Januari 2013 sampai dengan Desember 2017 sebesar 37% dengan taraf signifikansi 4% ($0,04 < 0,05$), dan sisanya sebesar 63% penerimaan PPN dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini.

2. Saran

Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP) disarankan agar dapat mengevaluasi faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan PPN. Dalam hal ini adalah variabel ekonomi makro yaitu inflasi dan nilai tukar serta jumlah pengusaha kena pajak untuk menjadi bahan pertimbangan demi tercapainya target yang telah ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Djuanda dan lubis. 2003. Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Handiani, Sylvia. 2014. Pengaruh Harga Emas Dunia, Harga Minyak Dunia, Nilai Tukar Dolar Amerika/Rupiah Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan Pada Periode 2008-2013. Universitas Katolik Parahyangan Bandung, E-Journal Graduate Unpar, Vol. 1, No. 1, 2014.
- Lipsey, Richard g. et. all. 1993. Pengantar Makroekonomi : Edisi Kedelapan. PT. Gelora Aksara Pratama. Jakarta.
- Mankiw, N. Gregory. 2007. Makroekonomi : Edisi Keenam. Erlangga. Jakarta.
- Manurung, Romulus, et. all. 2001. Analisa Peluang Dan Kendala Peningkatan Penerimaan PPN Dalam APBN, Studi Kasus KPP. Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan Vol. 5 No. 2.
- Mardiasmo. 2011. Perpajakan edisi revisi 2011. Andi Publisher, Yogyakarta.
- Murni, Asfia. 2006. Ekonomika Makro. PT. Refika Aditama. Jakarta.
- Nuraeni, Dwi. 2011. Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak (PKP) terhadap penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. UIN, Jakarta.
- Nurrokhman, Arif. 2013. Analisis Pengaruh Jumlah Pengusaha Kena Pajak dan Surat Pemberitahuan Masa Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi Empiris di KPP Pratama Semarang Gayamsari). Jurnal Akuntansi Universitas Dian Nuswantoro. Semarang.
- Puspitha, Putu V dan Supadmi, Ni Luh. 2018. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Pada Penerimaan PPN (Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Se-Bali). E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol. 22. No. 2. Bali.
- Rahardja, Prathama dan Manurung, Mandala. 2004. Teori Ekonomi Makro Suatu Pengantar : Edisi Kedua. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta.

- Resmi, Siti. 2009. Perpajakan Teori dan Kasus, edisi 5. Salemba Empat, Yogyakarta.
- Renata, Almira Herna. 2016. Pengaruh Inflasi, Nilai Tukar Rupiah dan Jumlah Pengusaha Kena Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (Studi pada Kantor Wilayah DJP Jawa Timur I). Universitas Brawijaya. Jurnal Perpajakan (JEJAK) Vol. 9 No. 1. 2016.
- Saepudin. 2008. Analisis Pengaruh Inflasi dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Penerimaan PPN pada Kanwil DJP Jakarta Selatan. UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Sukirno, Sadono. 2011. Makroekonomi Teori Pengantar. PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta
- Sukardji, Untung. 2014. Pokok-Pokok Pajak Pertambahan Nilai Indonesia. Edisi Revisi 2014. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sinambela, Lijan P. 2014. Metodologi Penelitian Kuantitatif. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Sinambela, Tongam. 2016. Perpajakan, Buku 1. Deepublish, Yogyakarta.
- Sugiyono. 2014. Metode Penelitian. Alfabeta, Bnadung.
- Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 Tentang Ekstensifikasi Dan Intensifikasi.
- Todaro, Michael P. Dan Smith, Stephen C. 2006. Pembangunan Ekonomi : Edisi Kesembilan Jilid 2. Erlangga. Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP).
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
- Utari, Woro. 2003. Analisis Fundamental Ekonomi Makro Serta Pengaruhnya Terhadap Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai. Surabaya : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Wijaya Putra

Wahyudi, Eddi. 2009. Dampak Fluktuasi Ekonomi Terhadap Penerimaan Pajak. Institut Pertanian Bogor Jurnal Ekonomi Vol. 6 No. 1. Bogor.
Waluyo. 2013. Perpajakan Indonesia. Salemba Empat, Jakarta.

Warnita, dkk. 2016. Pengaruh Inflasi, Tingkat Suku Bunga Sertifikat Bank Indonesia, dan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Penerimaan PPN. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Bung Hatta. 2016.

Wijayanti, Wahyu Kartika dan N, Y. Agus Bagus Budi. 2010. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Total Penerimaan Pajak Negara dan Efektivitas Peraturan Perpajakan Media Ekonomi. Vol. 18 No. 1, April 2010.

Pengertian Inflasi, dalam <http://taufieqhiedaeyat.blogspot.co.id/2010/07/html>, 03 April 2018.

Definisi Inflasi, Jenis-jenis Inflasi dan Cara Penanganannya, dalam <http://hariannetral.com/2015/05/html>, 03 April 2018.

Penerimaan APBN, dalam <http://www.data-apbn.kemenkeu.go.id/Dataset/Details/1011>, 03 April 2018.

LAPORAN INFLASI (Indeks Harga Konsumen), dalam <https://www.bps.go.id/statictable.html>, 03 April 2018.

KURS TRANSAKSI BANK INDONESIA, dalam <https://www.bi.go.id/id/moneter/informasi-kurs/transaksi-bi/Default.aspx>, 03 April